

ANALISIS DATA INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020–2024

Wisda Zulaeha Suwardi

Manajemen SDM, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
widasuardi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada asumsi umum bahwa peningkatan investasi dan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk melihat sejauh mana keterkaitan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, maupun antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara tren terdapat peningkatan dalam nilai investasi dan pengeluaran pemerintah, hal tersebut tidak secara langsung tercermin dalam perubahan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dan investasi di daerah sangat bergantung pada kualitas implementasi, kesiapan infrastruktur, serta sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada besaran anggaran atau nilai investasi, tetapi juga pada optimalisasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: investasi swasta, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja suatu negara atau daerah. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan tidak hanya mencerminkan peningkatan output nasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Para ekonom dan pembuat kebijakan telah lama berdebat tentang instrumen apa yang akan memaksimalkan pertumbuhan dalam konteks pembangunan ekonomi. Belanja pemerintah (government spending) dan investasi swasta (private investment) adalah dua alat yang menonjol dalam berbagai penelitian. Dipercaya bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika ekonomi, tetapi efeknya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi negara, struktur institusional, dan seberapa efektif mereka dilaksanakan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, khususnya dalam bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika anggaran dialokasikan secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi fisik perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik memudahkan distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan memperkuat modal manusia yang diperlukan sektor swasta (Christie & Rioja, 2017; Rahman & Anis, 2023). Belanja pemerintah yang terarah dapat mempercepat pertumbuhan inklusif, memperbaiki kesenjangan sosial, dan meningkatkan lingkungan usaha.

Pengeluaran pemerintah tidak selalu membuahkan hasil positif. Dalam praktiknya, banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam memastikan penggunaan dana publik yang efisien (Halkos & Paizanos, 2016; Lee, Wu, & Lee, 2017). Di beberapa kasus, peningkatan belanja negara lebih banyak

terserap untuk konsumsi birokrasi dan subsidi yang tidak produktif, alih-alih untuk investasi jangka panjang. Ketika alokasi anggaran tidak selaras dengan kebutuhan pembangunan atau tidak diawasi dengan baik, maka tujuan pertumbuhan yang diharapkan bisa menjadi kontraproduktif.

Salah satu masalah yang umum terkait dengan belanja pemerintah adalah fenomena crowding-out, di mana peningkatan belanja pemerintah justru mengurangi ruang fiskal dan insentif sektor swasta untuk berinvestasi. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah membiayai defisit melalui pinjaman besar, yang pada akhirnya meningkatkan suku bunga dan membuat pembiayaan lebih terjangkau bagi sektor swasta (Butkiewicz & Yanikkaya, 2011; Chotia & Rao, 2017). Dalam jangka panjang, struktur keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakseimbangan makroekonomi dan melemahkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.

Mekanisme pasar mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Perusahaan swasta, baik kecil maupun besar, memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan lapangan kerja. Investasi swasta dapat berkembang dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan lingkungan bisnis yang kondusif (Pham, Nguyen, Vu, & Phan, 2025; Turan, Yanikkaya, & Özer, 2021). Peran sektor swasta khususnya terlihat jelas di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan jasa keuangan, karena fleksibilitas dan efisiensi pasar dapat memastikan alokasi sumber daya yang lebih optimal.

Investasi swasta sering menjadi pelengkap terhadap investasi publik. Dalam banyak kasus, keberadaan infrastruktur dasar yang disiapkan oleh pemerintah mampu mendorong masuknya investasi swasta ke suatu daerah. Misalnya, ketika pemerintah membangun jalan tol atau jaringan pelabuhan, investor dari sektor logistik, manufaktur, dan perdagangan akan tertarik untuk ikut serta karena biaya distribusi menjadi lebih efisien (Canh & Lien, 2020; Siregar, 2019). Kombinasi pengeluaran pemerintah dan investasi swasta yang saling mendukung ini menciptakan efek sinergis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Seperti halnya belanja pemerintah, realisasi investasi swasta juga menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang tumpang tindih, sistem hukum yang tidak konsisten, serta keterbatasan akses pembiayaan menjadi hambatan utama bagi investor, terutama di negara-negara berkembang (Brhouri et al., 2024; Munemo, 2012). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam memperbaiki iklim investasi, menciptakan kepastian hukum, dan mengurangi beban administratif. Tanpa reformasi kelembagaan dan deregulasi yang tepat, maka peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan bisa sangat terbatas.

Dalam beberapa kasus, investasi swasta juga bisa terdampak negatif oleh pengeluaran pemerintah yang tidak proporsional. Ketika belanja pemerintah terlalu dominan dan tidak produktif, bisa terjadi efek crowding-out terhadap investasi swasta. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap belanja negara kadang membuat pasar menjadi pasif dan kurang kompetitif (Afonso, Alves, & Fortuna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta untuk pertumbuhan sangat tergantung pada kualitas institusi, kapasitas pengelolaan anggaran, dan kebijakan makroekonomi yang mendukung.

Secara keseluruhan, literatur ekonomi menunjukkan bahwa baik belanja pemerintah maupun investasi swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak ada satu formula yang berlaku universal. Efektivitas dari kedua instrumen ini sangat bergantung pada kondisi struktural dan kelembagaan masing-masing negara. Negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sistem hukum yang adil, dan regulasi yang jelas cenderung lebih berhasil dalam mengoptimalkan dampak positif dari belanja pemerintah dan investasi swasta.

Memahami bagaimana kedua instrumen ini saling berinteraksi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang krusial dalam perumusan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peran aktif dalam pembangunan dan pemberian ruang yang cukup bagi sektor swasta untuk berkembang. Menciptakan sinergi antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga berkaitan erat dengan reformasi institusional dan penguatan kapasitas tata kelola ekonomi.

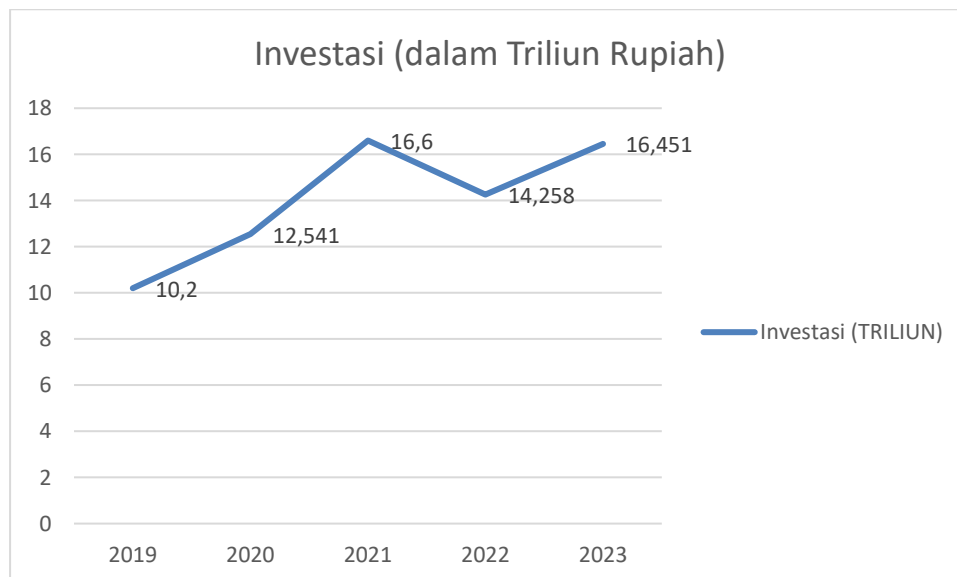
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan antarvariabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data investasi (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan pertumbuhan ekonomi (Y) selama periode 2019-2023 (5 tahun). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data investasi diperoleh dari DPMPSTP SULSEL. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari BPS yakni SULSEL dalam angka. Investasi dan pengeluaran pemerintah disajikan dalam triliun rupiah, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi disajikan dalam bentuk persen.

Setelah memperoleh data, dilakukan analisis deskriptif menggunakan microsoft Excel. Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan visualisasi yang memperjelas hasil penelitian. Visualisasi disajikan dalam bentuk diagram. Setelah analisis deskriptif dilanjutkan pada tahap analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tren masing-masing variabel, serta melalui uji korelasi guna mengetahui arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Hasil temuan kemudian dibahas secara kritis dengan mengaitkannya pada temuan-temuan sebelumnya dan kerangka teori yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika ekonomi daerah. Analisis pertama yang digunakan adalah deskriptif, Investasi disajikan dalam Gambar 1:

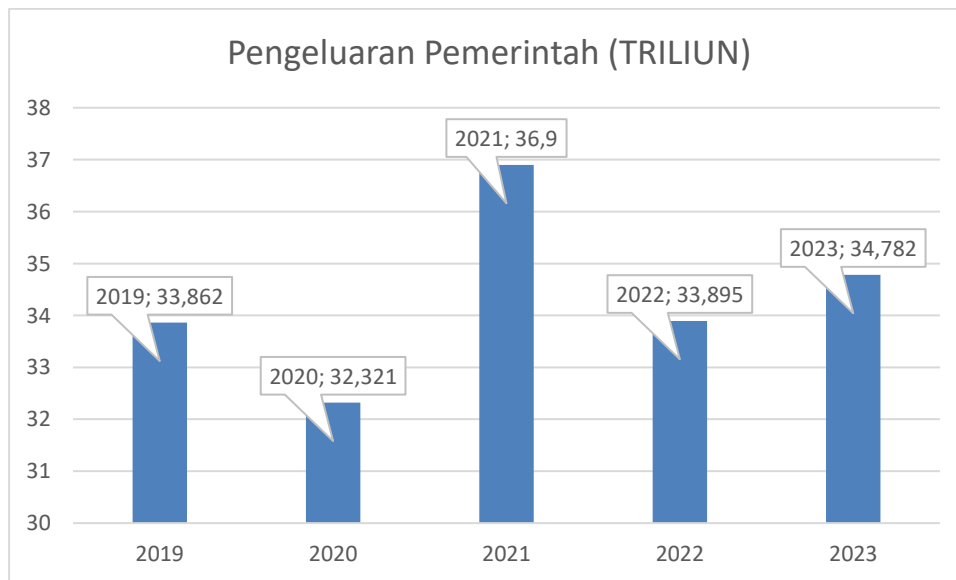


Gambar 1: Tren Investasi Sejak 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa terjadi fluktuasi investasi swasta di Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, total investasi tercatat sebesar Rp10,2 triliun, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp16,6 triliun.

Pada tahun 2022, investasi mengalami penurunan menjadi Rp14,258 triliun, sebelum kembali naik menjadi Rp16,451 triliun pada tahun 2023.

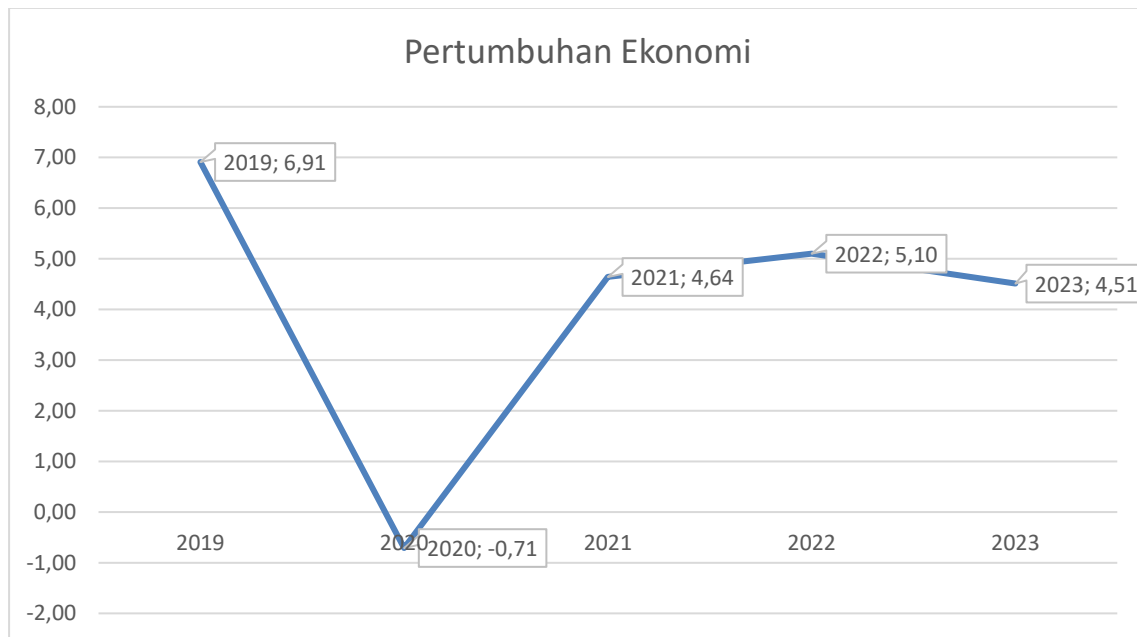
Secara umum, tren ini menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu meskipun terdapat koreksi pada tahun 2022. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 atau dinamika makroekonomi nasional. Kenaikan kembali pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai tanda pemulihan ekonomi dan meningkatnya kepercayaan investor. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran pengeluaran pemerintah 2019-2023 disajikan pada Gambar 2



Gambar 2: Tren Pengeluaran Pemerintah 2019-2023

Data menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, total pengeluaran tercatat sebesar Rp33,862 triliun, dan sempat menurun pada tahun 2020 menjadi Rp32,321 triliun. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dalam pengeluaran pemerintah hingga mencapai Rp36,9 triliun, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode pengamatan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan upaya pemulihan ekonomi melalui belanja fiskal yang diperbesar, termasuk program-program stimulus.

Namun, tren ini kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp33,895 triliun, dan sedikit meningkat pada 2023 menjadi Rp34,782 triliun. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pengeluaran pada tahun 2021, pemerintah melakukan penyesuaian fiskal agar kembali pada batas yang lebih terkendali.



Gambar 3: Tren Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh cukup tinggi sebesar 6,91%, mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan ekspansif sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam hingga -0,71%, seiring dengan krisis kesehatan dan ekonomi global yang menghambat aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.

Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 4,64%, yang dilanjutkan dengan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2022 sebesar 5,10%. Angka ini mencerminkan keberhasilan awal program pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,51%, namun masih dalam jalur positif dan menunjukkan konsistensi pemulihan. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antar variabel disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1: Nilai Korelasi Product Moment

| | | Investasi Swasta | Pengeluaran Pemerintah | Pertumbuhan Ekonomi |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Investasi Swasta | Pearson Correlation | 1 | .681 | -.032 |
| | Sig. (2-tailed) | | .206 | .959 |
| | N | 5 | 5 | 5 |
| Pengeluaran Pemerintah | Pearson Correlation | .681 | 1 | .496 |
| | Sig. (2-tailed) | .206 | | .395 |
| | N | 5 | 5 | 5 |
| Pertumbuhan Ekonomi | Pearson Correlation | -.032 | .496 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .959 | .395 | |
| | N | 5 | 5 | 5 |

1. Hubungan antara Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat atau signifikan secara statistik antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun nilai investasi meningkat dari waktu ke waktu, hal ini tidak selalu sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pada 2022, investasi mengalami penurunan sementara pertumbuhan ekonomi justru mencapai titik tertinggi selama masa pemulihan.

Demikian pula, antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa lonjakan pengeluaran pemerintah pada 2021 tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan tajam dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada 2023, meskipun pengeluaran pemerintah naik, pertumbuhan ekonomi justru melambat.

Antara investasi swasta dan pengeluaran pemerintah sendiri tampak ada kecenderungan untuk bergerak searah dalam beberapa tahun, tetapi hubungan ini juga belum menunjukkan pola yang konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat maupun signifikan antara investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023. Meskipun tren investasi swasta mengalami peningkatan secara umum, hal tersebut tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, sebagaimana tercermin dari nilai korelasi yang sangat lemah.

Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu. Pham et al. (2025) misalnya, menemukan bahwa di beberapa provinsi Vietnam, investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Saglam & Yalta (2011) dalam penelitian mereka di Turki, yang menyatakan tidak terdapat hubungan jangka panjang antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu penjelasan yang mungkin adalah adanya efek crowding-out, yakni ketika peningkatan pengeluaran pemerintah justru mengurangi ruang tumbuh investasi swasta. Hal ini sejalan dengan temuan (Trebicka, Gjini, & Fortuzi, 2023) di Albania, yang menunjukkan bahwa investasi publik yang besar dapat menurunkan peran sektor swasta melalui persaingan terhadap sumber daya pembiayaan.

Namun demikian, tidak semua literatur mendukung temuan ini. Berbagai penelitian lain justru menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks jangka panjang dan negara dengan tata kelola fiskal yang baik. Turan et al. (2021), misalnya, menemukan bahwa di banyak negara maju dan berkembang, investasi swasta memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, Afonso et al. (2025) menunjukkan bahwa di 18 negara maju, investasi swasta merupakan salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis VAR yang kuat.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kemungkinan besar efektivitas investasi tergantung pada sektor yang menerima investasi, kesiapan infrastruktur penunjang, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Oleh karena itu, meskipun secara statistik hubungan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam penelitian ini, hal itu tidak serta merta mengurangi pentingnya peran investasi swasta. Sebaliknya, diperlukan evaluasi yang lebih dalam terhadap kualitas, arah, dan daya ungkit dari investasi yang masuk ke daerah.

2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Teori ekonomi klasik dan Keynesian sering menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, temuan empiris terkini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu konsisten atau signifikan. Dalam beberapa konteks, khususnya di negara berkembang atau di wilayah dengan kualitas institusi yang lemah, belanja pemerintah justru gagal mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Diskusi ini membahas kompleksitas dari ketidakterkaitan tersebut berdasarkan berbagai temuan lintas negara dan pendekatan metodologis.

Salah satu bukti yang paling mencolok datang dari kawasan ECOWAS (Economic Community of West African States). Studi yang dilakukan oleh Olaoye & Afolabi (2020) tidak menemukan adanya hubungan kausal satu arah maupun dua arah antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menyoroti bahwa tingginya tingkat korupsi, besarnya ukuran pemerintahan, serta pemborosan sumber daya publik menjadi faktor utama yang menyebabkan belanja pemerintah tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah dapat melemahkan efektivitas kebijakan fiskal.

Temuan serupa juga terlihat di Honduras. Villela & Paredes (2022) menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2020, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun dana telah dialokasikan secara substansial, hasilnya tidak mencerminkan peningkatan kualitas modal manusia. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakefisienan sistem pendidikan, rendahnya kualitas layanan, atau kurangnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara lebih umum, tinjauan literatur yang luas menunjukkan hasil yang bercampur. Nyasha & Odhiambo (2019) menemukan bahwa sejak tahun 1980-an, berbagai studi memberikan hasil yang berbeda, ada yang menunjukkan dampak positif, negatif, maupun tidak berdampak sama sekali. Ketidakkonsistenan ini menandakan bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sangat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi. Komposisi pengeluaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan stabilitas makroekonomi memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir dari belanja pemerintah.

Bahkan di negara maju seperti Republik Ceko, Szarowská (2011) menemukan bahwa korelasi antara belanja pemerintah dan PDB sangat lemah. Dalam analisisnya terhadap data antara tahun 1995 hingga 2008, ditemukan bahwa hanya beberapa kategori belanja yang menunjukkan hubungan kontrasi terhadap siklus ekonomi, sedangkan yang lainnya tidak memiliki hubungan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa jenis belanja, bukan hanya jumlahnya menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kirikkaleli & Ozbeser (2022) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terlihat dalam jangka pendek atau selama masa resesi. Dalam jangka panjang, justru pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan belanja pemerintah, sejalan dengan Hukum Wagner. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya bisa bersifat asimetris dan berubah tergantung pada konteks waktu dan kondisi ekonomi.

Pendekatan yang lebih kompleks terlihat dalam studi Leshoro (2017) di Afrika Selatan. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bersifat non-linear. Artinya, dampak belanja terhadap pertumbuhan tidak tetap dan dapat berubah tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Pada titik tertentu, tambahan belanja pemerintah bahkan dapat memberikan hasil yang menurun atau negatif terhadap pertumbuhan.

Dari keseluruhan temuan tersebut, terlihat bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang linier, universal, maupun deterministik. Efektivitas pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada tata kelola, komposisi pengeluaran, efisiensi, dan kapasitas institusi dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena itu, daripada hanya fokus pada kuantitas belanja, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dan arah kebijakan fiskalnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data selama lima tahun (2019–2023), dapat disimpulkan bahwa baik investasi swasta maupun pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun terdapat tren peningkatan investasi dan fluktuasi belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta bergerak searah dengan kedua variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti kualitas investasi, efektivitas pengeluaran, infrastruktur penunjang, dan kebijakan makroekonomi kemungkinan lebih berpengaruh dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan antara investasi swasta dan pertumbuhan

ekonomi bersifat kontekstual, tergantung pada kondisi institusional dan struktur perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, meskipun besaran investasi dan belanja pemerintah penting, namun optimalisasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas, arah, dan sinergi kebijakan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, O., Alves, P., & Fortuna, N. (2025). The Impact of Fiscal Policy on the Economic Growth of OECD Members between 1985 and 2015. *Panoeconomicus*, 72(2), 165–182. <https://doi.org/10.2298/PAN210423014A>
- Brhouri, J., El Idrissi, Z., Oudrar, M., Hajar, T., Bouayad Amine, N., & Ait Oudra, M. (2024). The effect of monetary policy on the private sector investment in Morocco: VECM approach. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 5446–5456. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3209>
- Butkiewicz, J. L., & Yanikkaya, H. (2011). Institutions and the impact of government spending on growth. *Journal of Applied Economics*, 14(2), 319–341. [https://doi.org/10.1016/S1514-0326\(11\)60017-2](https://doi.org/10.1016/S1514-0326(11)60017-2)
- Canh, N. T., & Lien, N. T. T. (2020). The impacts of public investment on return and economic growth by economic industry in Vietnam. *Afro-Asian Journal of Finance and Accounting*, 10(3), 320–340. Inderscience Publishers. <https://doi.org/10.1504/AAJFA.2020.108243>
- Chotia, V., & Rao, N. V. M. (2017). Examining the impact of public investment and private investment on economic growth: Empirical evidence from BRICS nations. *International Journal of Economics and Business Research*, 14(2), 128–137. <https://doi.org/10.1504/IJEBR.2017.086706>
- Christie, T. A. L., & Rioja, F. K. (2017). Fiscal position and the financing of productive government expenditures: an application to Latin America. *Journal of Economic Policy Reform*, 20(2), 113–135. <https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1119045>
- Halkos, G. E., & Paizanos, E. A. (2016). Fiscal policy and economic performance: A review. *Journal of Reviews on Global Economics*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2016.05.01>
- Kirikaleli, D., & Ozbeser, B. (2022). New insights into an old issue: exploring the nexus between government expenditures and economic growth in the United States. *Applied Economics Letters*, 29(2), 129–134. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1859448>
- Lee, S.-C., Wu, S.-F., & Lee, C.-T. (2017). Government Size and Stochastic Growth. *Australian Economic Papers*, 56(3), 219–227. <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12086>
- Leshoro, T. L. A. (2017). Investigating the non-linear Wagner's hypothesis in South Africa. *African Journal of Economic and Management Studies*, 8(4), 462–473. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-01-2017-0008>
- Munemo, J. (2012). Business Regulations and Private Domestic Investment in Africa. *Journal of African Business*, 13(2), 157–164. <https://doi.org/10.1080/15228916.2012.693447>
- Nyasha, S., & Odhiambo, N. M. (2019). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth: A Review of International Literature. *Folia Oeconomica Stetinensia*, 19(2), 81–101. <https://doi.org/10.2478/fofi-2019-0015>

- Olaoye, O., & Afolabi, O. (2020). Government spending and economic growth: a trivariate causality testing. *African Journal of Economic and Management Studies*, 12(2), 250–268. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-07-2020-0334>
- Pham, V. K., Nguyen, N. A., Vu, T. N. Q., & Phan, T. T. (2025). Impact of Public, Private, and Foreign Direct Investments on Provincial Economic Growth: Evidence From a Transition Country. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 16(1). <https://doi.org/10.4018/IJABIM.366309>
- Rahman, M. M., & Anis, T. B. (2023). Government Expenditure On Education And Economic Growth: A Panel Data Analysis. *Journal of Community Positive Practices*, 23(2), 30–46. <https://doi.org/10.35782/JCPP.2023.2.03>
- Saglam, B. B., & Yalta, A. Y. (2011). Dynamic linkages among foreign direct investment, public investment and private investment: Evidence from Turkey. *Applied Econometrics and International Development*, 11(2), 71–82. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858376536&partnerID=40&md5=3530f1bfc6ac112d0ed2db9f9cff73bc>
- Siregar, B. (2019). Direct and indirect effects of investment on community welfare. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 206–216. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.19](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.19)
- Szarowská, I. (2011). Relationship between government spending and economic growth in the Czech Republic. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 59(7), 415–422. <https://doi.org/10.11118/actaun201159070415>
- Trebicka, B., Gjini, A., & Fortuzi, S. (2023). Crowding-out: Government & Private Investment Analysis. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(4 Special Issue), 262–270. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i4siart7>
- Turan, T., Yanikkaya, H., & Özer, H. A. (2021). Economic Growth Effects of Public and Private Investment: Evidence from Dynamic Panel Estimation for Developed and Developing Countries. *Prague Economic Papers*, 30(5), 613–631. <https://doi.org/10.18267/J.PEP.781>
- Villela, R., & Paredes, J. J. (2022). Empirical Analysis on Public Expenditure for Education, Human Capital and Economic Growth: Evidence from Honduras. *Economies*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/economies10100241>